

**ANALISA STRUKTUR SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT UNTUK
MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus Desa Setabu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Timur)**

Analysis of Community Socio-Economic Structure to Support Village Development (Case Study of Setabu Village, Sebatik District, Nunukan Regency, East Kalimantan Province)

Sri Anom Amongjati^{1,*}, Sofyan Sjaif², Afan Ray Mahardika²

¹ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

² Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

* E-mail: sri.anomamongjati@upnyk.ac.id

Diterima: 10 Januari 2024 | Direvisi: 2 Februari 2024 | Disetujui: 15 Maret 2024

ABSTRACT

The Village Law mandates that village development must be carried out, either independently by village, regional and national governments or through multi-party collaboration, so a precise analysis of the socio-economic situation in the village is needed. This research aims to present an analysis of the socio-economic structure in the village and its appropriate use for village development planning, both for communities and families. Through an interview process and Focus Group Discussion (FGD) with stakeholders as well as 100% data collection on all family heads in the village, descriptive data analysis was carried out on the quantitative and qualitative data collected. The research results show that the structure of the upper, middle and lower layers of society is influenced by access and stability of capital at the household level and the relationship patterns that occur between each social layer in society. The few options for solving problems due to low capital ownership in the lower social layers provide vulnerability to the position of this group. Therefore, in the context of village development, a comprehensive data-based analysis of the socio-economic structure of the community needs to be a reference for the development planning of relevant stakeholders, both at the community and household level so that development allocation is right on target for development subjects in the village up to the household level.

Keyword: *Community, Family, Socio-Economic Structure, Village*

ABSTRAK

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan desa harus dilaksanakan, baik secara mandiri oleh pemerintah desa, daerah, dan nasional maupun melalui kerjasama multipihak sehingga dibutuhkan analisa yang presisi terhadap situasi sosial ekonomi di desa. Penelitian ini bertujuan menyajikan analisa struktur sosial ekonomi di desa dan pemanfaatannya yang tepat bagi perencanaan pembangunan desa, baik bagi komunitas masyarakat maupun keluarga. Melalui proses wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap *stakeholder* serta pengambilan data 100% terhadap seluruh kepala keluarga di desa, dilakukan analisis data secara deskriptif terhadap data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan struktur lapisan atas, menengah, dan bawah masyarakat dipengaruhi oleh akses serta kestabilan kapital pada tingkat rumah tangga dan pola relasi yang terjadi antar setiap lapisan sosial di masyarakat. Sedikitnya pilihan penyelesaian masalah akibat rendahnya kepemilikan kapital pada lapisan sosial bawah memberikan kerentanan terhadap posisi kelompok tersebut. Oleh karena itu dalam konteks

pembangunan desa, analisa struktur sosial ekonomi berbasis data yang menyeluruh pada masyarakat perlu menjadi rujukan perencanaan pembangunan stakeholder terkait, baik pada tingkat komunitas maupun tingkat rumah tangga agar alokasi pembangunan tepat sasaran pada subjek pembangunan di desa hingga tingkat rumah tangga.

Kata kunci: pembangunan desa, keluarga, komunitas, struktur sosial-ekonomi

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk mengelola pembangunan yang diperlukan sesuai dengan konteks lokal. Hal ini merupakan bagian dari revitalisasi dalam penataan kewenangan, keuangan, manajemen pemerintahan, pembangunan desa, dan partisipasi masyarakat (Timotius, 2018).

Bentuk dari revitalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini dapat melalui dua pendekatan, yaitu membangun desa dan desa membangun. Membangun desa menekankan kepada peran pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di desa. Adapun desa membangun menekankan kepada peran aktif desa dalam membangun desa berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan pembiayaan maupun kerjasama multipihak (Kolopaking et al., 2019).

Dalam prosesnya, baik itu dalam konsep desa membangun dan membangun desa ditemukan berbagai dinamika yang menghambat proses pembangunan tersebut. Dalam beberapa kasus penelitian desa masih belum dapat memaksimalkan program-program pembangunan, BUMDES, kewirausahaan, pelatihan, maupun peningkatan sumber daya manusia (Lisnawati & Lestari, 2019). Dalam temuan lain dijelaskan tidak optimalnya proses pembangunan terjadi akibat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang masih rendah (Ariadi, 2019).

Walaupun pembangunan itu sendiri dapat diukur dengan status pengklasifikasian Indeks Desa Membangun (IDM) dengan bentuk Desa Berkembang, Desa Maju, atau Desa Mandiri (Muhtarom et al., 2018), disisi lain pembangunan baik itu bentuk Desa Membangun dan Membangun Desa sering mengalami masalah pada kepresisian program pembangunan yang tidak tepat sasaran akibat lemahnya kolekting data masyarakat di desa (Sjaf et al., 2022). Hal ini tentu mengingatkan pada apa yang dijelaskan oleh seorang penulis bahwa salah satu 'dosa' dari pembangunan di desa adalah ruang-ruang pelaksanaan pembangunan yang tidak sampai kepada jalan-jalan setapak di kantong-kantong kemiskinan desa dan hanya selesai saat biaya pembangunan selesai dibelanjakan (Chambers, 2013).

Berkaca dari temuan diatas, maka lemahnya penerapan pembangunan dapat terjadi akibat lemahnya proses *collecting data*, lemahnya proses analisa, dan lemahnya proses perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan konteks lokal yang tepat sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Proses *collecting data* mengacu kepada keharusan desa untuk memiliki data lengkap data kondisi setiap rumah tangga dari aspek ekonomi dan infrastukturnya. Proses analisa terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi struktur masyarakat yang ada sehingga dapat ditindaklanjuti dengan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan konteks kebutuhan dalam struktur sosial yang ada didesa. Struktur

sosial sendiri merupakan proses interaksi yang berlangsung lama, teratur dan membentuk suatu pola serta seperangkat unsur-unsur dalam masyarakat serta mempertahankan batas-batas atau kesatuan bagian-bagiannya (Kusmanto & Elizabeth, 2018). Oleh karena itu penting agar perencanaan ikut mempertimbangkan unsur-unsur yang mengikat dalam masyarakat.

Desa Setabu merupakan salah satu wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia yang memiliki keterbatasan akses terhadap data-data sosial ekonomi masyarakat. Mengandalkan data yang dimiliki bersumber dari data Badan Pusat Statistik tidak cukup untuk dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun rumah tangga penduduk. Akibatnya proses perencanaan pembangunan tidak sampai kepada tingkat rumah tangga yang membutuhkan.

Persoalan yang terjadi di Desa Setabu perlu dijawab dengan memberikan suatu pendekatan dan analisa yang tepat dalam mempersiapkan gambaran empirik struktur sosial masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini, pendekatan dan analisa yang tepat dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan pada masyarakat maupun hingga tingkat rumah tangga warga masyarakat. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah : menyajikan analisa struktur sosial ekonomi di desa dan pemanfaatannya yang tepat bagi perencanaan pembangunan desa, baik bagi komunitas masyarakat maupun keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan aktivitas sensus terhadap 904 kepala keluarga yang ada di Desa Sebatik dengan

melibatkan partisipasi pemuda desa dan penggerak desa yang telah dilatih dalam melakukan sensus dan pengambilan data terhadap seluruh keluarga di Desa Setabu.

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa data sandang, pangan, dan papan yang telah didapatkan untuk dihitung, diolah, dan dilakukan scoring dan diberikan pelabelan atas scoring yang didapatkan. Adapaun pendekatan kualitatif dilakukan dengan aktivitas observasi dan FGD bersama perwakilan RT, pemuda, petani, dan tokoh masyarakat. Sebagian informasi kemudian disajikan dalam bentuk analisa lapisan struktur sosial di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosiologis Masyarakat Desa Setabu

Desa Setabu yang secara administratif berada di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bagian dari pulau sebatik yang berbagi wilayah secara langsung dengan perbatasan Negara Malaysia. Melalui proses pendataan sensus data desa secara presisi, didapatkan jumlah kepala keluarga sebanyak 904 KK dimana berdasarkan rasio umur warga masyarakat memiliki rasio tanggungan 49,7/100. Artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung beban 49,7 usia tidak produktif.

Merujuk dari jumlah penduduk dan luasan wilayah di Desa Setabu berdasarkan perhitungan dengan luas wilayah masing-masing RT, dari 13 Rukun Tetangga (RT) terdapat 4 RT yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi yaitu RT 01, RT 02, RT 08, dan RT 04. RT 7 memiliki kepadatan dengan kondisi sedang, sedangkan sisanya memiliki kepadatan yang rendah kecuali RT 11 yang saat data ini diambil tidak lagi memiliki penghuni di wilayah perbukitan Desa Setabu. Seluruh wilayah RT selain pola pemukimannya mengikuti jalan poros, pola pemukiman

juga terpusat pada jarak yang tidak terlampau jauh dari wilayah pesisir. Hal ini dikarenakan itu akan jarang ditemukan masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi-lokasi yang mengarah ke wilayah perbukitan, kecuali bagi masyarakat yang memilih untuk tinggal berdekatan dengan lokasi perkebunan sawitnya.

Mengaitkan masyarakat dengan karakter sosial-ekonominya, masyarakat Desa Setabu memiliki keragaman karakteristik jenis pekerjaan mulai dari sektor kelautan yang terfokus pada nelayan/petambak, petani kebun, pedagang, maupun juga pegawai dalam sektor pemerintahan maupun UMKM. Sebanyak 240 KK di Desa Setabu memiliki profesi sebagai nelayan/petambak, dan 180 diantaranya berada 4 wilayah Rukun Tetangga yang kepadatannya cukup tinggi. Di empat wilayah ini tersebar pemukiman-pemukiman nelayan/petambak rumput laut yang berada di wilayah perairan atau masyarakat yang menggantungkan pada sektor kelautan seperti transportasi laut maupun perdagangan.

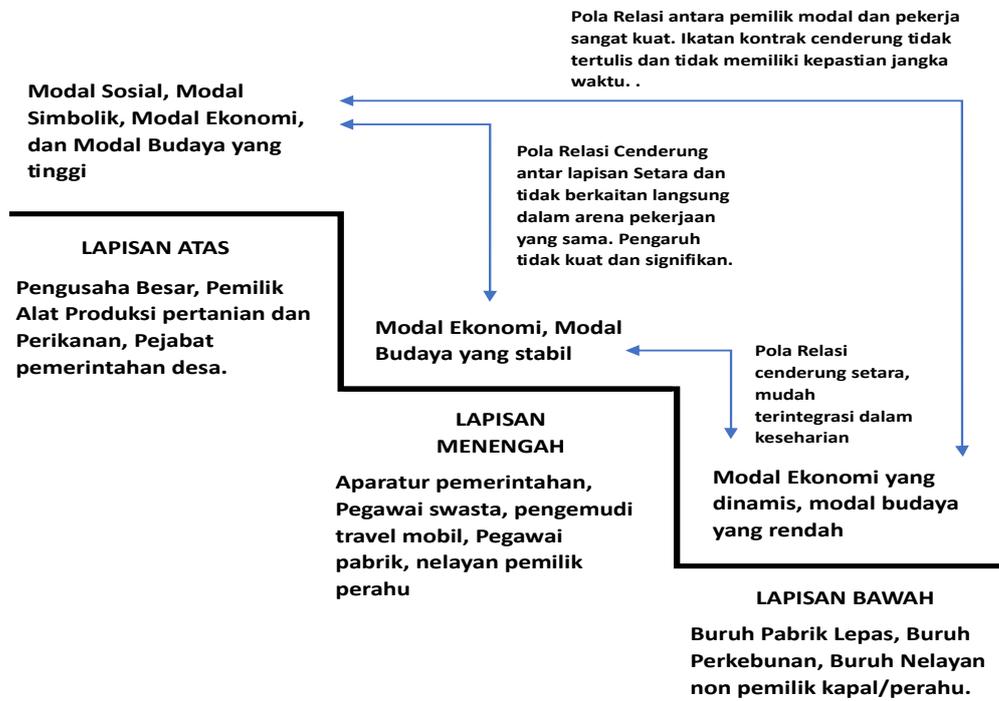
Kondisi pemukiman pesisir yang terfokus pada bibir laut mendorong masyarakat membangun pemukiman secara rapat dengan jarak yang tidak lebih dari 2-3 Meter. Pada beberapa kasus rumah tangga nelayan, kurang lebih 70 KK masih belum memiliki jamban dan 67 KK diantaranya membuang sampah ke laut. Akibatnya yang terjadi pencemaran laut, polusi, dan ancaman terhadap kesehatan juga menjadi persoalan. Kondisi ini semakin diperkuat dengan sulitnya pemenuhan kebutuhan air yang langka di wilayah Desa Setabu. Perubahan tipologi wilayah yang dahulu berupa padi sawah yang berubah menjadi kelapa sawit diindikasikan oleh warga masyarakat sebagai sebab sulitnya kebutuhan air di Desa Setabu.

Baik masyarakat yang ada di wilayah pesisir maupun perkebunan sawit pada dasarnya memiliki pilihan untuk tinggal

pada lokasi yang dekat dengan sumber mata pencahariannya untuk mempermudah akses terhadap sumberdaya alamnya. Batasan jam kerja yang cenderung tidak terpola sebagaimana pekerjaan pada status pegawai menjadikan aksesibilitas dan fleksibilitas menjadi pilihan utama. Kondisi inilah yang terjadi pada kasus RT 11 dimana tidak lagi ada yang tersisa dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut karena tidak ada lagi masyarakat yang tinggal untuk menggarap wilayah perkebunan tersebut.

Oleh karena itu dalam pembuatan keputusan pada tingkat rumah tangga, pilihan lokasi dan jenis bentuk rumah selain dipengaruhi oleh kebiasaan budaya setempat, juga dipengaruhi oleh karakteristik tempat tinggal dan lokasi sumberdaya alam terkait. Artinya walaupun indikator jenis rumah ikut menentukan status lapisan sosial masyarakat, akan tetapi pilihan-pilihan rumah tangga akan sangat menentukan pilihan tersebut.

Dalam mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi pada masyarakat, pendekatan basis lapisan masyarakat digunakan untuk mempermudah analisa terhadap struktur yang melekat dan proses mobilisasi yang mungkin dibutuhkan bagi masyarakat untuk mencapai kepada taraf kehidupan yang lebih baik. Identifikasi secara kualitatif dalam analisa lapisan sosial melekat pada tiga aspek utama, yaitu kepemilikan modal yang melekat pada masing-masing lapisan sosial, jenis pekerjaan, dan relasi sosial yang terbangun antar masing-masing lapisan sosial. Dalam proses penggalian informasi, secara bersama-sama masyarakat mengintrepasikan situasi sosial yang dialami oleh warga desa dalam sudut pandang kesehariannya.



Gambar 1. Struktur Sosial Masyarakat Setabu berbasis Bentuk Pekerjaan, Kepemilikan Modal, dan Relasi antar Lapisan

Identifikasi lapisan bila merujuk pada karakteristik kepemilikan modal menurut (Casey, 2018), digunakanlah empat pendekatan modal yaitu modal ekonomi, modal simbolik, modal sosial, dan modal budaya. Pada masyarakat lapisan atas modal ekonomi, modal simbolik, modal budaya, dan modal sosial cenderung tinggi. Hal ini oleh masyarakat dilihat dari kepemilikan aset ekonomi seperti kendaraan dan rumah yang jauh diatas rata-rata masyarakat, Selain itu masyarakat yang memiliki lahan juga teridentifikasi sebagai simbol dari masyarakat lapisan atas. Kondisi ini memperkuat temuan penting dalam suatu penelitian dimana masyarakat lapisan atas cenderung memiliki akses terhadap suatu besaran lahan (Zuraidah, 2022).

Begitu juga pendidikan yang diidentikkan pada masyarakat lapisan atas lebih tinggi dibandingkan lapisan lainnya. Kedua modal tersebut menjadi pendorong lahirnya modal simbolik dan modal sosial yang juga tinggi dihadapan masyarakat. Posisi yang cenderung dihormati serta pernyataan-pernyataan yang didengarkan

oleh masyarakat memberikan gambaran atas hal tersebut.

Identifikasi lapisan menengah oleh masyarakat dilihat lebih kepada kestabilan pada aspek modal ekonomi dan modal budaya. Kemampuan untuk melahirkan uang dalam kondisi stabil lahir dari status tetap pada pekerjaan dan modal produksi yang dimiliki. Hal ini terdapat pada masyarakat yang bekerja sebagai pegawai swasta, pengemudi travel mobil, pegawai pabrik, maupun juga nelayan-nelayan yang memiliki kapal-kapal kecil atau sedang. Begitu juga dengan pendidikan pada lapisan menengah yang dianggap mumpuni dan berkapasitas untuk bekerja pada sektor-sektor swasta maupun negeri dengan status tetap.

Identifikasi lapisan bawah pada dasarnya dilihat pada situasi modal ekonomi yang cenderung dinamis dan tidak pasti serta akses kepada pendidikan yang cenderung terbatas. Bentuk pekerjaan yang tidak tetap lahir dalam bentuk pedagang-pedagang kecil, buruh nelayan, perkebunan, dan pabrik. Ciri-ciri lain dari masyarakat lapisan bawah ini adalah kurangnya motivasi untuk menyekolahkan anak

kepada jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menyekolahkan secukupnya untuk siap membantu orang tuanya bekerja. Kecenderungan ini diaukui oleh masyarakat sebagai pilihan “rasional” lapisan bawah atas kebutuhan tenaga kerja kasar.

Pola relasi yang terbangun antara masing-masing lapisan digambarkan oleh masyarakat dalam bentuk dinamika struktur dalam masyarakat yang cenderung didominasi perannya oleh lapisan masyarakat atas. Sebagai gambaran dalam relasi masyarakat lapisan atas dan bawah ditunjukkan dengan pola relasi antara pemilik modal dan pekerja yang tidak terikat dengan ikatan kontrak yang tetap serta kepastian jangka waktu. Ikatan ini juga yang menyebabkan peran modal sosial dan modal simbolik pada lapisan atas semakin meningkat. Peran strategis masyarakat lapisan atas dalam pengambilan keputusan musyawarah menjadi gambaran atas modal sosial yang dimiliki lapisan atas di masyarakat. Bentuk lainnya digambarkan dengan posisi besar masyarakat lapisan atas yang cenderung didahulukan posisinya dalam agenda-agenda kebudayaan seperti pernikahan dan pengajian.

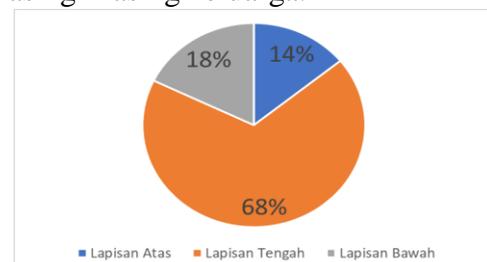
Situasi yang berbeda justru diperlihatkan dalam hubungan relasi antara masyarakat lapisan menengah dengan masyarakat lapisan atas dan bawah. Pola hubungan yang setara muncul dalam hubungan dua arah pada masyarakat lapisan menengah dapat dijelaskan atas ketidak terkaitan secara khusus dalam arena ekonomi dengan kedua bentuk lapisan lainnya. Bagi lapisan atas, masyarakat lapisan menengah memiliki kekuatan untuk menjadi penyeimbang dalam hal informasi-informasi luar maupun argument dalam musyawarah. Bagi lapisan bawah, lapisan menengah dianggap memiliki modal ekonomi yang cenderung lebih dekat khususnya dalam symbol ekonomi seperti jenis dan lokasi rumah maupun kendaraan yang cukup sederhana.

Secara umum dinamika struktur lapisan masyarakat selalu memberikan kerentanan terhadap struktur lapisan bawah di masyarakat. Situasi masyarakat lapisan bawah yang terjadi di Desa Setabu memperkuat padangan (Dharmawan, 2007) yang memberikan gambaran tentang kemiskinan yang membelenggu lapisan terendah dalam sistem sosial pedesaan dalam dimensi ketimpangan dan ketidakberdayaan penguasaan akses atas sumber-sumber nafkah (tanah, kapital, dan sumberdaya alam).

Gambaran Lapisan Sosial Masyarakat Desa Setabu

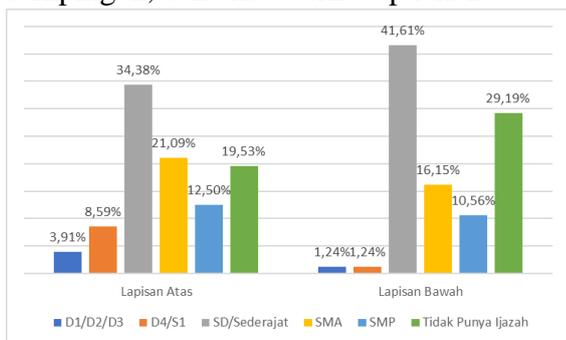
Terlepas dari gambaran lapisan sosial dalam analisa sosiologis, identifikasi lapisan sosial juga dapat dilihat dari akses terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang dihitung berdasarkan analisa kuantitatif. Ketiga hal tersebut baik sandang, pangan, dan papan merupakan salah satu bagian penting untuk melakukan perbaikan pembangunan di desa (Natalia & Sofyan Sjaf, 2022). Lapisan Sosial ini sendiri merupakan bentuk pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal(Aji, 2015). Oleh karena itu ditentukanlah lapisan sosial dalam tiga bentuk, yaitu lapisan atas, lapisan bawah, dan lapisan menengah.

Perhitungan ini dilakukan dengan mengakumulasikan variabel frekuensi makan dalam sehari, menu makanan yang dimakan, frekuensi beli pakaian selama satu tahun, daya PLN yang dipakai, jenis lantai, jenis dinding, dan jenis atap yang dipakai, kepemilikan jamban, dan kepemilikan terhadap rumah yang ditinggali oleh masing-masing keluarga.



Gambar 2. Lapisan Sosial Masyarakat Setabu 153

Dari total sebanyak 904 Kepala Keluarga, sebanyak 128 Kepala Keluarga masuk dalam kategori lapisan atas, 161 kepala keluarga masuk kedalam kategori lapisan bawah, dan 615 Kepala Keluarga masuk kedalam lapisan menengah. Lapisan sosial dapat diperlihatkan pada perbedaan dalam hal latar belakang pendidikan, profesi pekerjaan, kepemilikan pekerjaan sampingan, akses pemodal dan keuangan, akses terhadap pekerjaan sampingan, dan akses terhadap lahan.



Gambar 3. Presentase Latar Belakang Pendidikan setiap Lapisan Sosial

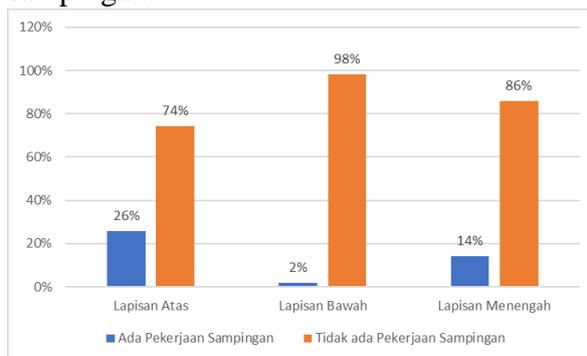
Berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki dimana pada lapisan atas maupun lapisan bawah, jumlah kepala keluarga dengan pendidikan sekolah dasar mendominasi dengan masing-masing sebanyak 34,38% dan 41,61%. Karakteristik yang berbeda antara kedua lapisan ini adalah presentase pada masyarakat yang berpendidikan D1/D2/D3 dan D4/S1 yang lebih tinggi pada lapisan atas.

Kondisi sebaliknya ditemukan pada masyarakat lapisan bawah dimana presentase kepala keluarga yang tidak memiliki ijazah mendominasi sebesar 29,195%. Memahami terkait latar belakang pendidikan menjadi penting karena tingkat pendidikan formal berpengaruh terhadap pendapatan usaha (Yanuarti et al., 2023). Dengan struktur masyarakat secara umum bekerja pada sektor-sektor non formal, pendidikan formal juga perlu diperhitungkan.

Terkait karakteristik profesi dapat juga terlihat dalam setiap lapisan

masyarakat. Masyarakat lapisan bawah secara umum mendominasi pada profesi pekerjaan sebagai nelayan/petambak, pekerja serabutan, dan pada masyarakat yang belum/tidak bekerja. Adapun masyarakat lapisan atas mendominasi pada aspek pekerjaan seperti petani/peternak, guru/pendidik, pedagang, maupun pegawai karyawan swasta.

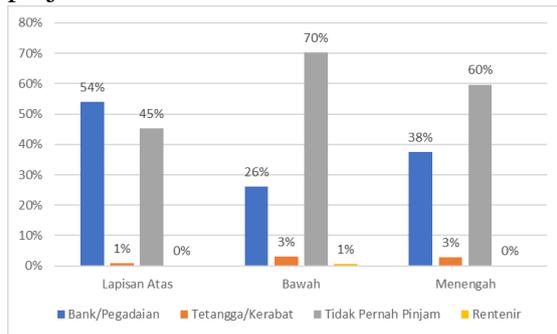
Salah satu bentuk resiliensi keluarga dalam aktivitas ekonominya ditunjukkan dengan menjalankan pekerjaan sampingan diluar pekerjaan utama dan melakukan pinjaman keuangan terhadap lembaga keuangan formal maupun non formal. Didapatkan bahwa sebanyak 74% dari masyarakat lapisan atas tidak memiliki pekerjaan sampingan dan sebesar 26% diantaranya memiliki pekerjaan sampingan. Secara signifikan pada masyarakat lapisan bawah didapatkan 98% diantaranya tidak memiliki pekerjaan sampingan dan hanya 2% saja yang memiliki pekerjaan sampingan.



Gambar 4. Presentase Kepemilikan Pekerjaan Sampingan di Setiap Lapisan Sosial

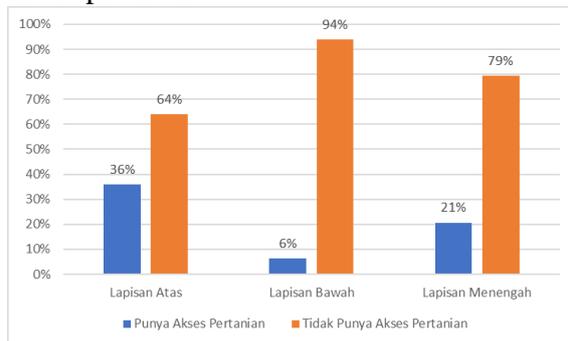
Begitu juga temuan yang didapatkan terkait pinjaman yang dilakukan oleh rumah tangga dimana sebanyak 54% dari masyarakat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan seperti bank/pegadaian dan sebanyak 45% tidak pernah melakukan pinjaman. Akan tetapi kondisi sebaliknya ditemukan pada masyarakat lapisan bawah yang 70% diantaranya tidak pernah melakukan pinjaman dan hanya 26% yang melakukan pinjaman kepada bank/pegadaian. Presentase lebih sedikit ditemukan pada

masyarakat lapisan menengah yang dimana 60% diantaranya tidak pernah melakukan pinjaman.



Gambar 5. Presentase Sumber Melakukan Pinjaman pada masing-masing Lapisan Sosial Masyarakat

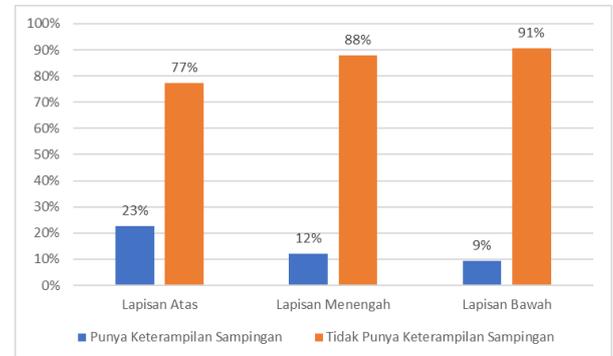
Salah satu sumber pemasukan penting bagi masyarakat lainnya adalah kekuatan kapital yang dibentuk dari kepemilikan aset dan kapasitas sumber daya di masyarakat. Berdasarkan data yang telah dihimpun, akses kepemilikan lahan banyak dimiliki oleh masyarakat lapisan atas dengan total sebanyak 36% dan masyarakat lapisan menengah sebesar 21%, sedangkan pada masyarakat lapisan bawah, hanya didapatkan 6% saja dari masyarakat lapisan tersebut yang memiliki akses terhadap lahan pertanian.



Gambar 6. Presentase Akses terhadap Lahan Pertanian setiap Lapisan Sosial

Unsur kapital lainnya yang menjadi perhatian adalah keterampilan sampingan yang dimiliki oleh unsur kepala rumah tangga di desa. Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa baik lapisan atas, menengah, dan bawah memiliki keterampilan sampingan yang cukup signifikan. Pada masyarakat lapisan atas ditemukan bahwa hanya 23% diantaranya yang memiliki keterampilan sampingan

yang dapat diandalkan untuk mencari kebutuhan nafkah lainnya. Sisanya sebanyak 77% tidak memilikinya. Kasus lebih signifikan ditemukan pada masyarakat lapisan bawah dimana sebanyak 91% diantaranya tidak memiliki keterampilan sampingan yang dapat diandalkan untuk mencari kebutuhan ekonomi tambahan.



Gambar 7. Kepemilikan terhadap Keterampilan Sampingan setiap lapisan sosial

Berdasarkan keseluruhan aspek tersebut, masyarakat lapisan bawah memiliki kerentanan terhadap pilihan-pilihan untuk mendorong jaminan ekonomi yang lebih baik. Lemahnya kapital pada akses lahan dan keterampilan sampingan memberikan gambaran semakin sempitnya pilihan-pilihan bagi keluarga lapisan bawah untuk memiliki alternatif terhadap sumber-sumber ekonomi. Pilihan tersebut semakin sempit ketika melihat ketidakberdayaan masyarakat lapisan bawah dalam membuat alternatif lain dalam bentuk melakukan pinjaman uang. Banyaknya masyarakat lapisan bawah yang tidak melakukan pinjaman keuangan bukan berarti karena tidak membutuhkan, melainkan karena ketidakmampuan untuk memberikan jaminan pembayaran yang sifatnya rutin dengan Batasan jatuh temponya.

Karakteristik mata pencaharian ganda yang juga biasa menjadi strategi warga dalam mendatangkan income juga tidak berjalan. Karakteristik wilayah yang cukup jauh dari pusat ekonomi menjadikan pilihan mata pencaharian ganda tidak lagi menjadi

alternatif yang menyebabkan banyaknya masyarakat lapisan bawah tidak memiliki pekerjaan sampingan. Karakteristik selanjutnya yang menjadi ciri khas dari karakter lapisan bawah ini adalah tekonsentrasinya masyarakat lapisan bawah pada mata pencaharian sebagai nelayan/penambak yang jumlahnya sangat signifikan pada masyarakat lapisan bawah.

Rendahnya pekerjaan sampingan yang dalam hal ini tidak diterapkan pola nafkah ganda pada masyarakat lapisan bawah menjadi pembeda dengan temuan (Fauzia et al., 2023) di wilayah Bekasi yang menyatakan bahwa pola nafkah ganda masih menjadi andalan dalam pemenuhan rumah tangga petani. Kondisi ini boleh jadi dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik dan tantangan masyarakat Jawa dan Luar Jawa atas tuntutan kebutuhan hidup dan menjadi dasar atas rasa “cukup” pada masyarakat lapisan bawah di Desa Setabu.

Analisa Kuantitatif dan Kualitatif Lapisan Sosial sebagai Rujukan Pembangunan di Desa

Salah satu unsur penting dalam proses pembangunan di suatu wilayah adalah memahami fakta-fakta empirik dalam unsur wilayah objek pembangunan. Untuk memahaminya, maka diperlukan suatu pendekatan yang memungkinkan untuk

melahirkan satu kepastian sasaran pembangunan yang tepat sesuai dengan target pembangunan. Penentuan lapisan sosial yang ada di masyarakat merupakan salah satu bentuk analisa sosial yang penting untuk melihat suatu segmentasi yang ada di masyarakat berdasarkan indikator-indikator berbasis infrastruktur maupun juga berbasis kepada persepsi masyarakat atas situasi di desa. Oleh karena itu pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dalam memahami lapisan sosial di masyarakat memiliki bentuk, tujuan, dan pemanfaatan yang berbeda.

Pendekatan Kualitatif dalam proses analisa lapisan masyarakat dilakukan dalam bentuk menyajikan persepsi warga terhadap situasi sosial di desa berdasarkan kekuatan kapital baik itu kapital sosial, kapital ekonomi, kapital budaya, dan kapital simbolik sebagai dasar lahirnya pembagian lapisan serta mempengaruhi relasi antar lapisan sosial. Tujuannya adalah memperoleh gambaran lapisan sosial yang bersifat khas berdasarkan ukuran masyarakat Dimana interaksi sosial telah terbangun. Pemanfaatan data ini adalah sebagai analisa dasar perencanaan pembangunan berbasis sosial dan komunitas.

Tabel 1. Bentuk, Tujuan, Pemanfaatan, dan Pemanfaat Utama Analisa Lapisan Sosial

Analisa Lapisan Sosial		
	Kualitatif	Kuantitatif
Bentuk	Persepsi Warga masyarakat terhadap struktur sosial di masyarakat berdasarkan kekuatan kapital/modal dan relasi sosial yang terbangun antar lapisan sosial	100% data setiap kepala keluarga dengan menilai aspek sandang, pangan, dan papan.
Tujuan	Diperolehnya gambaran lapisan sosial yang bersifat khas dan lokal dimana inetaksi sosial berada.	Memperoleh gambaran lapisan sosial secara terkuantifikasi hingga tingkat rumah tangga dan dapat diukur nilainya para periode waktu tertentu saat program diterapkan
Pemanfaatan data untuk Pembangunan	Analisa Dasar perencanaan pembangunan berbasis sosial dan komunitas serta proses menjembatani antar lapisan sosial untuk terbangun modal sosial baru	Analisa tingkat rumah tangga berdasarkan lapisan sosial dan penyelesaian secara langsung maupun tidak langsung unsur-unsur yang terkait lapisan sosial.
Pemanfaatan	Pemerintah Desa, Stakeholder Informal	Pemerintah Desa, Daerah, Pusat

Sebagai contoh dalam menyusun suatu integrasi komunitas, kapital simbolik dan kapital sosial dapat dimobilisasi untuk membangun keeratan dalam komunitas dan menjembatani jurang pemisah antara kaya dan miskin. Proses ini dapat digambarkan sebagai penyusunan ulang kembali modal sosial baru di desa. Bila ini tercapai, harapannya dengan penggunaan modal sosial yang tepat akan meningkatkan akses setiap orang untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan, kesejatan, kenyamanan, perumahan, dan kesempatan kerja (Saifuddin, 2020).

Adapun pendekatan kuantitatif dalam proses analisa lapisan sosial dilakukan dalam bentuk pengumpulan data secara empirik berdasarkan atas kondisi faktual setiap keluarga di desa dengan menggambarkan kondisi sandang, pangan, dan papan yang mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh gambaran lapisan sosial berdasarkan ukuran yang terkuantifikasi hingga tingkat rumah tangga yang dapat diukur perkembangan nilainya pada periode waktu tertentu ketika program pembangunan diterapkan. Syaratnya adalah setiap rumah tangga harus teridentifikasi secara jelas kategorisai lapisannya.

Kasus ini tidak hanya berlaku bagi kebutuhan sandang, pangan, dan papan namun juga analisa lainnya seperti hak atas bantuan sosial, jenis pekerjaan, beasiswa, dan segala informasi yang dibutuhkan di masing-masing lapisan sosial. Sebagai contoh suatu keluarga dapat meningkat statusnya dari lapisan bawah ke lapisan menengah ketika adanya perbaikan dalam hal kepemilikan jamban di rumah atau peningkatan asupan pangan hariannya. Oleh karena itu pemerintah dapat secara tepat memberikan program pembangunan yang tepat hingga tingkat rumah tangga berdasarkan kasus yang berbeda-beda. Begitu juga ketika melakukan identifikasi jenis bantuan yang belum didapatkan dan

kebutuhan beasiswa bagi yang membutuhkan, dengan mengetahui struktur lapisan sosial berdasarkan data yang ada maka ada didapatkan subjek penerima manfaat yang tepat membutuhkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Analisa struktur lapisan sosial masyarakat di Desa Setabu menunjukkan bahwa masyarakat lapisan atas, menengah, dan bawah ditentukan oleh akses terhadap kapital/modal, stabilitas atas akses harian terhadap kapital, juga oleh relasi antara lapisan sosial tersebut di masyarakat. Rendahnya akses terhadap lahan pertanian, keterampilan sampingan, pekerjaan, modal keuangan, maupun juga pendidikan pada masyarakat lapisan sosial bawah menjadi gambaran perbedaan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik bila dibandingkan masyarakat lapisan atas.

Menguasai pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menganalisa struktur sosial ekonomi seperti diatas dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan selama dilakukan pada bentuk, tujuan, langkah pemanfaatan, serta stakeholder yang memanfaatkannya.

Pendekatan kualitatif didekatkan dengan analisa persepsi masyarakat terhadap situasi sosial masyarakat dengan indikator kepemilikan kapital/modal didalam masyarakat dan bentuk relasi yang terbangun antara lapisan sosial. Adapun pendekatan kuantitatif didekatkan dengan perhitungan kuantifikasi atas akses terhadap sandangan, pangan, dan papan pada setiap rumah tangga di desa yang dilakukan secara 100% pengambilan data di tingkat desa. Dua pendekatan ini memiliki efektifitas yang berbeda dalam pendekatan pembangunan dimana pendekatan kualitatif digunakan dalam pembangunan berbasis komunitas dan pendekatan kuantitatif digunakan dalam pembangunan berbasis rumah tangga.

Pendekatan kualitatif perlu didorong oleh stakeholder pada tingkatan formal dan informal di desa untuk membangun bridging antar setiap lapisan sosial dengan memahami unsur-unsur kapital yang ada dalam setiap lapisan sosial. Sedangkan pendekatan kuantitatif perlu didorong oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh program pembangunan sampai pada unsur rumah tangga yang membutuhkan khususnya pada masyarakat lapisan bawah.

Penguasaan desa terhadap kedua pendekatan ini menjadi penting agar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dapat dilandaskan pada kekakuratan data yang tinggi. Hak istimewa desa terhadap berbagai sumber pendanaan memungkinkan desa menyusun rencana pembangunan berbasis data yang dihimpun secara mandiri oleh desa.

REFERENSI

- Aji, R. H. S. (2015). Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(1), 34–37.
- Ariadi, A. (2019). Bantu Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147. https://www.kemendiknas.go.id/sites/default/files/publikasilain/Buku-Bantu-Pengelolaan-Pembangunan-Desa-BAB_3_0.pdf
- Casey, K. L. (2018). *Defining Political Capital : A Reconsideration of Bourdieu ' s Interconvertibility Theory Defining Political Capital : A Reconsideration of Bourdieu ' s Interconvertibility Theory*. January 2005.
- Chambers, R. (2013). *Pembangunan desa : mulai dari belakang / Robert Chambers ; diterjemahkan oleh Pepep Sudradjat ; pengantar M . Dawam Rahardjo*. 2013.
- Dharmawan, A. H. (2007). Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Strategy) Mazhab Bogor. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 1(2), 169–192.
- Fauzia, R., Azzahra, F., Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, M., Singaperbangsa Karawang, U., Ronggo Waluyo, J. H., Telukjambe Timur, K., Karawang, K., Barat, J., & Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, D. (2023). ANALISIS STRUKTUR DAN STRATEGI NAFKAH RUMAH TANGGA PETANI KANGKUNG DARAT (*Ipomoea reptans*) DI DESA KEDUNGJAYA KECAMATAN BABELAN Analysis of the Structure and Strategy of Household Livelihoods of Land Kale (*Ipomoea reptans*) Farmers in Kedungjaya Village, Babelan District. *Jurnal Agrimanex*, 4(1), 81–90.
- Kolopaking, L. M., Septianto, M., & Ambarita, E. (2019). The Synergy of Village Developing Management through Corporate Social Responsibility Activities. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 102–109. <https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.26164>
- Kusmanto, T. Y., & Elizabeth, M. Z. (2018). Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2252>
- Lisnawati, L., & Lestari, S. (2019). Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri berkelanjutan pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3390>
- Muhtarom, Kusuma, N., & Purwanti, E. (2018). Village Index Analysis Building to Know The Village Development In Gadingrejo District of Pringsewu District. *Inovasi*

- Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(02), 179–190.
<https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96>
- Natalia, G., & Sofyan Sjaf. (2022). Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi (Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(06.), 742–756.
<https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i06.914>
- Saifuddin. (2020). Pembangunan ekonomi masyarakat berbasis modal sosial. In *JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen* (Vol. 6, Issue 2, pp. 68–77).
- Sjaf, S., Sampean, Arsyad, A. A., Elson, L., Mahardika, A. R., Hakim, L., Amongjati, S. A., Gandi, R., Barlan, Z. A., Aditya, I. M. G., Maulana, S. A. B., & Rangkuti, M. R. (2022). Data Desa Presisi: A new method of rural data collection. *MethodsX*, 9.
<https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101868>
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Yanuarti, M., Apriyanti, C., Prisdinawati, D., & Milanda B, P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Usaha Industri Gula Aren di Kecamatan Selupu Rejang. *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, 3(2), 199–207.
<https://doi.org/10.35706/agrimanex.v3i2.8678>
- Zuraidah, K. I. (2022). Stratifikasi Sosial Masyarakat Petani Desa Berdasarkan Kepemilikan Tanah. *Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(1), 95.
<https://doi.org/10.35329/fkip.v18i1.1965>